

***Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Banjir di Desa Sumput
Kabupaten Gresik**

Hilmy Asyam B.S¹, Tukiman²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

hilmyasyam20@gmail.com¹, tukiman_upnjatim@yahoo.com²

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how collaborative governance works in flood management in Sumput Village, Gresik Regency. Ansell and Gash's collaboration model (Islamy, 2018) explains that there are four important indicators for the success of a collaboration, namely institutional design that can function as a basic rule in implementing collaboration, and leadership as a mediator and facilitator in collaboration. Collaborative governance in flood management in Sumput Village includes the involvement of other parties in the implementation process. In this study, the data used were through interviews, observations, and documentation that may be analyzed qualitatively. The results of this study explain that the collaboration model in flood management in Sumput Village involves several parties, including the Gresik Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD), the community, and the private sector. This study also explains that collaboration in flood management in Sumput Village has been running as desired so that the impact of flooding can be reduced, but in terms of implementation it is still not optimal because there are still many problems that need to be addressed such as public awareness and efforts to find the best solution.

Keywords : *Collaborative Governance, Mitigation, Flood.*

ABSTRAK

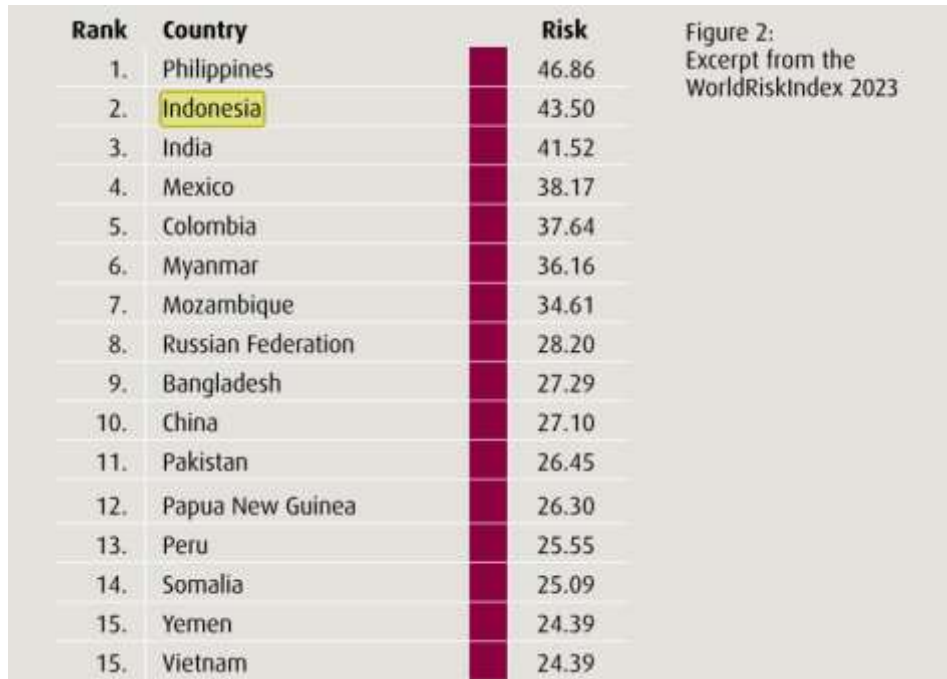
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Bagaimana Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumput Kabupaten Gresik. Dijelaskan dalam model kolaborasi Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) terdapat 4 indikator penting dalam keberhasilan sebuah kolaborasi yaitu Desain Kelembagaan yang dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam melaksanakan kolaborasi, dan kepemimpinan sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi. Collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumput ini didalamnya terdapat keterlibatan pihak lain dalam proses pelaksanaannya. Dalam penelitian ini data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemungkinan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa model kolaborasi dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumput melibatkan beberapa pihak, diantaranya BPBD Kabupaten Gresik, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kolaborasi dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumput sudah berjalan sesuai yang di inginkan agar dampak dari banjir bisa di kurangi, namun dari segi penerapan masih belum begitu optimal karena masih banyak masalah yang perlu di atasi seperti kesadaran masyarakat dan upaya dalam mencari solusi yang terbaik.

Kata kunci : Collaborative Governance, Penanggulangan, Banjir.

PENDAHULUAN

Indonesia juga perlu melakukan kolaborasi dalam hal kebencanaan, sebagai negara yang menempati urutan ke-2 dengan resiko 43.50% (risiko tinggi) dari 193 negara yang paling rentan terhadap bencana (Frege et al., 2023). Gempa bumi,

banjir, dan tanah longsor menjadi tiga bencana yang paling sering terjadi dan berpotensi mengakibatkan kehancuran terbesar pada aset fisik di Indonesia. Kerugian karena terjadinya bencana membuat Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Selama periode 2000-2016, Indonesia telah menanggung rata-rata sebesar Rp22,8 triliun per tahun hanya karena bencana alam dan non alam.



Gambar 1. Resiko Bencana dari Beberapa Negara

Sumber: World Risk Index, 2023

Diantara sekian banyak bencana di Indonesia salah satu bencana yang paling dirasakan masyarakat setiap tahun adalah bencana banjir, Kondisi banjir yang terjadi di Indonesia terkesan dilaksanakan belum secara maksimal dan seakan dilaksanakan sendiri - sendiri, seperti yang dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan (Irawan, 2022). Banjir adalah salah satu bentuk daya rusak air yang merupakan fenomena alam karena tingginya curah hujan dan tidak cukupnya kapasitas badan air (sungai atau saluran drainase) untuk menampung dan mengalirkan air (Astuti, 2020). Banjir biasanya dianggap sebagai kenaikan tinggi permukaan air yang melebihi keadaan normalnya atau dalam pengertian umum meluapnya air melewati batas kapasitas saluran yang normal. Banjir juga diartikan sebagai kondisi dimana limpasan air mengalir di atas permukaan air yang melebihi tinggi muka biasanya yang menggenangi wilayah tepian yang lebih rendah limpasan air (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).

Tabel 1. Jumlah Bencana Banjir Di Pulau Jawa

| Provinsi | Jumlah Bencana Banjir |
|-------------|-----------------------|
| Jawa Timur | 86 |
| Jawa Barat | 79 |
| Jawa Tengah | 71 |

Sumber: BPS Jakarta (diakses pada 2025)

Sepanjang tahun 2024, Pulau Jawa masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi, tercermin dari tingginya jumlah kejadian banjir yang tercatat di berbagai provinsi. Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan jumlah kejadian banjir mencapai 86 kasus, diikuti oleh Jawa Barat dengan 79 kasus, dan Jawa Tengah dengan 71 kasus. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan banjir di ketiga provinsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan tata ruang, maupun mitigasi risiko bencana.

Tabel 2. Jumlah Bencana Banjir Di Jawa Timur

| Kab/Kota | Jumlah Bencana Banjir |
|-----------|-----------------------|
| Gresik | 5 |
| Mojokerto | 4 |
| Surabaya | 1 |

Sumber: BPS Jawa Timur (diakses pada 2025)

Dari data tersebut di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, sepanjang tahun 2024, tercatat beberapa wilayah yang mengalami bencana banjir dengan frekuensi yang berbeda-beda. Kabupaten Gresik mencatat jumlah kejadian banjir terbanyak di antara daerah sekitarnya, yakni sebanyak 5 kali kejadian. Menyusul kemudian Kabupaten Mojokerto dengan 4 kejadian banjir, sementara Kota Surabaya mengalami 1 kejadian banjir dalam periode yang sama. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun skala kejadian banjir di Surabaya relatif kecil dibandingkan Gresik dan Mojokerto, setiap kejadian tetap berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Kabupaten Gresik, sebagai wilayah yang paling terdampak, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan drainase, perubahan tata guna lahan, serta rendahnya kapasitas serapan air akibat urbanisasi yang masif.

Hujan deras mengguyur kawasan Gresik Selatan. Meski hanya 1 jam, jalan Sumput, Driyorejo, Gresik kembali tergenang banjir. Hujan deras mulai mengguyur sejak pukul 11.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB. Meski demikian banjir menggenangi seluruh jalanan Sumput, termasuk jalanan yang baru saja yang dicor setinggi 80 cm. Menurutnya, sebelum diperbaiki, Jalan Sumput memang sering terjadi banjir. Namun, tidak sampai ke pasar hingga permukiman warga. Semenjak itu warga Driyorejo lainnya ingin langsung menagih janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk mengatasi banjir tersebut. Sebab, semenjak melakukan perbaikan jalan tersebut, kondisi banjir malah makin parah. Akibat jalan yang tergenang banjir, kendaraan yang melintas di wilayah itu pun celaka.

Tabel 3. Ketinggian Banjir Area Gresik Selatan

| Ketinggian Banjir | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Tahun | Desa/Kelurahan | Ketinggian Air |
| 2025 | Karangandong | 20 – 70 cm |
| | Sumput | 30 - 80 cm |
| | Mojosarirejo | 20 - 70 cm |
| | Driyorejo | 20 - 40 cm |

Sumber: Kecamatan Driyorejo, 2025

Berdasarkan data ketinggian air di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik pada tahun 2024, terlihat bahwa ketinggian air banjir bervariasi antar wilayah. Di Desa Karangandong mencatat ketinggian air banjir antara 20 hingga 70 cm, menunjukkan tingkat genangan yang cukup signifikan di beberapa titik wilayah. Sedangkan Desa Sumput memiliki ketinggian air tertinggi di antara wilayah lain, yaitu mencapai 30 hingga 80 cm, mengindikasikan bahwa desa ini merupakan salah satu lokasi dengan risiko banjir paling tinggi, kemungkinan disebabkan oleh posisi geografisnya yang rendah atau kurang optimalnya sistem drainase di wilayah tersebut. Setelah itu di Desa Mojosarirejo memiliki tingkat genangan air serupa dengan Karangandong, yaitu berada pada kisaran 20 hingga 70 cm. Sementara itu, Desa Driyorejo sendiri, yang menjadi pusat kecamatan, memiliki ketinggian air banjir paling rendah dibandingkan desa lainnya, yaitu hanya berkisar antara 20 hingga 40 cm. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun genangan tetap terjadi, wilayah ini memiliki kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan desa lainnya, kemungkinan karena sistem drainase yang lebih terpelihara atau adanya upaya pengelolaan risiko banjir yang lebih intensif. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa banjir di Kecamatan Driyorejo masih menjadi permasalahan yang serius, dengan variasi tingkat genangan yang cukup tinggi di berbagai desa. Upaya mitigasi banjir, seperti normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase, serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga lingkungan, menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak banjir di masa depan.

TINJAUAN LITERATUR

Governance

Proses Governance melibatkan 3 aktor penting. Masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah merupakan tiga aktor tersebut. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aktor tersebut saling bekerja sama. Negara tidak lagi dikelola sepenuhnya oleh pemerintah sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak lain mengingat adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi. Peran sektor privat sangat diperlukan untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, terutama dari segi pendanaan. Namun, dalam hal ini, pihak swasta tidak boleh memprioritaskan kepentingan pribadi atau hanya fokus pada mencari keuntungan semata.

Sektor swasta dianggap sebagai mitra strategis pemerintah karena memiliki aset yang tidak tersedia bagi pemerintah, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan. Institusi politik dan lembaga-lembaga di sektor publik termasuk

dalam pemerintah atau negara sebagai komponen Governance. Bisnis swasta yang beroperasi di pasar dan sektor-sektor lain yang tidak terorganisir termasuk dalam 19 sektor swasta. Sektor swasta dikatakan sebagai komponen masyarakat karena memiliki pengaruh dalam keputusan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat meningkatkan iklim pasar dan bisnis. Menurut konsep Governance, masyarakat terdiri dari individu dan kelompok yang terlibat dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi baik secara formal maupun informal. Kelompok non-pemerintah, asosiasi bisnis, dan organisasi lainnya adalah bagian dari masyarakat (Triaryanti 2019:36)

Collaborative Governance

Menurut Retno et al. (2020:41-42), Collaborative Governance dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang melibatkan partisipasi bersama secara setara. Dalam proses ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, serta setiap stakeholder diberikan peluang yang adil untuk menyampaikan pandangan atau keinginan mereka. Collaborative Governance bisa diartikan adalah kondisi yang terjadi dimana suatu kerjasama antara pihak pemerintah dan sektor privat untuk mencapai tujuan yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Konsep ini dianggap sebagai bentuk adaptasi organisasi dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarmo (2011) dalam penelitian (Retno et al., 2020:72). Transformasi dapat meliputi penambahan jumlah pihak yang terlibat dalam kebijakan, persoalan yang melebihi batas yang telah ditetapkan, peningkatan kemampuan di luar lingkup di dalam pemerintah daerah serta pemerintah pusat secara umum, dan perluasan gerakan masyarakat yang bersifat spontan.

Penanggulangan Bencana

Menurut Wardo (2010:12), yang dirujuk oleh Haqqi (2019), langkah-langkah penanggulangan terhadap bencana wajib di laksanakan tidak hanya setelah bencana itu terjadi, tetapi juga jauh sebelum bencana tersebut datang. Proses penanggulangan bencana meliputi beberapa tahapan, yaitu fase pra-bencana (termasuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi), fase tanggap darurat, serta fase pasca-bencana yang melibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi:

A. Pra bencana

Bencana bisa terjadi tanpa peringatan, sehingga kesiapan menghadapi keadaan darurat menjadi hal yang sangat penting. Hal ini terutama berlaku bagi daerah yang jarang atau bahkan tidak pernah mengalami bencana selama puluhan hingga ratusan tahun, karena wilayah tersebut mungkin tidak dianggap berisiko tinggi. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, diperlukan berbagai tindakan seperti pencegahan, kesiapan dalam menghadapi situasi darurat, serta langkah-langkah mitigasi.

B. Tanggap Darurat (response)

Bencana bisa terjadi secara mendadak, sehingga sangat penting untuk menyiapkan segala keperluan sebagai langkah antisipasi. Hal ini menjadi lebih krusial bagi wilayah berpotensi dimana akan mengalami sebuah bencana, terutama

karena daerah tersebut belum termasuk dalam kategori biasanya terjadi banjir dan mungkin dalam kurun lama tidak menghadapi kejadian serupa. Tindakan yang bisa dilakukan mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, serta upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

C. Setelah Bencana (recovery)

Tindakan kemanusiaan, pemulihan, serta pembangunan kembali mencakup berbagai upaya yang dilakukan setelah suatu bencana terjadi. Tujuan utamanya adalah secara bertahap menyelamatkan nyawa, memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, mengembalikan kehidupan seperti semula, serta memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Aktivitas yang dilakukan mencakup penyediaan hunian sementara, penyebaran informasi kepada masyarakat, edukasi mengenai kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi fasilitas, layanan konseling, serta analisis dampak ekonomi akibat bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam upaya penanggulangan banjir di Desa Sumpat, Kabupaten Gresik. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumpat sebagai wilayah yang terdampak banjir secara berulang. Fokus penelitian mengacu pada model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2008) yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan Kepala Desa, pihak swasta terkait, serta masyarakat Desa Sumpat, dan data sekunder berupa dokumen, laporan, serta arsip pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan kredibilitas temuan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif serta rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di Desa Sumpat, Kabupaten Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Kondisi awal dapat diartikan sebagai awal mula dari sebelum adanya kolaborasi yang terjadi hingga bagaimana proses kolaborasi antar para pemangku 86 kepentingan dapat terjalin. Menurut Ansell & Gash (2008) kondisi awal tersebut diatas dapat dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu, ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar aktor kolaborasi, adanya aspek insentif (motivasi) yang jelas, kendala stakeholders untuk berkolaborasi (Konflik). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2022), menyatakan bahwa

tiga indikator penting dari kondisi awal berpengaruh terhadap terbentuknya proses collaborative governance.

1. Ketidakseimbangan pengetahuan atau Sumber Daya

Ketidakseimbangan pengetahuan atau sumber daya terlihat dari pihak perangkat Desa Sumput dalam upaya mengatasi masalah banjir ini dari pengetahuan masyarakat yang kurang bisa menjaga lingkungan seperti sampah yang menumpuk di selokan menjadikan air terhambat sehingga terjadi banjir. Di tambah ada beberapa pihak yang kurang peduli terkait masalah banjir sehingga menghiraukan dan menganggap banjir adalah masalah yang biasa dan tidak perlu di perhatikan.

Komitmen awal yang dimiliki oleh para pelaku kolaborasi yaitu pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta ditunjukkan dari adanya bantuan-bantuan yang telah diberikan. Hal ini bertujuan untuk keberhasilan dalam penanggulangan banjir di Desa Sumput. Di buktikan dengan peran pemerintah adanya bantuan dari pihak BPBD seperti pemetaan wilayah rawan banjir, pencegahan atau kesiagaan banjir dan rehabilitasi atau rekonstruksi. Kemudian dari pihak swasta melalui program CSR mereka memberikan bantuan berupa normalisasi sungai dan selokan dari sampah. Lalu dari pihak perangkat desa dan masyarakat ikut dalam menjaga lingkungan agar banjir tidak makin parah kedepannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setelah adanya kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat dan swasta sumber daya yang pada awalnya tidak ada menjadi ada.

2. Insentif Untuk Berpartisipasi

Dalam penelitian ini, faktor motivasi yang menyebabkan para aktor ikut dalam proses kolaborasi berawal dari ketidakmampuan antar masing-masing stakeholders mengatasi masalah yang ada. Pemerintah Kabupaten Gresik tidak mampu menangani permasalahan di lingkungannya seperti banjir yang sering terjadi apalagi memasuki musim penghujan akan semakin tidak teratasi, banyak masyarakat yang membuang sampah secara liar, kurang pembersihan jalur air di daerah sekitar permukiman yang berakibat pada tersumbat dikarenakan sampah yang membuat masalah banjir makin parah. Pemerintah memandang penting untuk melakukan kolaborasi karena hasil yang akan didapat bisa memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bustomi et al., 2022) yang menyatakan Insentif untuk berpartisipasi sebagian bergantung pada harapan pemangku kepentingan tentang apakah proses kolaboratif akan menghasilkan hasil yang bermakna, terutama terhadap keseimbangan waktu dan energi yang dibutuhkan kolaborasi.

Selanjutnya PT Dayasa Aria Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kertas (paper mill), melalui program CSR mereka bisa ikut berperan dalam penanganan masalah banjir. Sedangkan peran pemerintah dalam penanggulangan banjir sebagai pembuat kebijakan, melakukan pengawasan, serta memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan apabila terjadi bencana banjir di masyarakat. Sehingga Kolaborasi antara Pemerintah dengan PT Dayasa Aria Prima dan Masyarakat Desa Sumput ini bisa terjalin dengan baik.

3. Kendala atau Konflik Untuk Berkolaborasi

Penanggulangan Sampah adalah hal yang sangat penting dalam dilakukan karena banjir dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, serta merusak rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur. Keadaan penanggulangan banjir di Desa Sumput saat awal tidak tertangani dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban beberapa informan. Kepala Desa menjelaskan bahwa memang kondisi awal belum ada penanggulangan sampah. Kondisi awal yang terbengkalai membuat kolaborasi dilakukan, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2022), yang menyatakan bahwa latar belakang konflik mempengaruhi proses kolaborasi sesuai dengan kepentingan pemerintah, konflik yang dapat diredakan menjadikan kolaborasi mulai berjalan perlahan.

Faktor yang menjadi adanya kendala adalah kondisi lapangan yang ada di Desa Sumput di tambah daerah rawan banjir. Pada saat awal terjadinya banjir di sebabkan kapasitas drainase yang terbatas sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras, faktor lain yang memperparah adalah adanya sedimentasi dan sampah yang menyumbat saluran air sehingga aliran menjadi terhambat. Ansell & Gash (2008) mengemukakan bahwa konflik cenderung membuat tingkat kepercayaan rendah, yang pada akhirnya akan menghasilkan rendahnya tingkat komitmen, strategi manipulasi dan komunikasi yang tidak jujur. Untuk mengatasi kendala yang terjadi, pemerintah dan pihak terkait membuat sebuah ajakan ke masyarakat pentingnya penanggulangan banjir ini bisa segera dilakukan. Mereka selalu mengadakan sosialisasi dan musyawarah rutin kepada masyarakat. Kegiatan tersebut hampir dilakukan beberapa hari sekali dalam waktu satu tahun. Setelah melalui proses sosialisasi dan musyawarah untuk meyakinkan masyarakat. Dengan kondisi awal dari sebelum adanya kolaborasi hingga memasuki proses kolaborasi di Desa Sumput dapat dikatakan sudah baik. Ditunjukkan dari adanya motivasi awal stakeholders sehingga memunculkan komitmen yang kuat bagi para aktor untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar dan tata cara serta penyelenggaraan yang transparan dalam proses kolaborasi Ansell & Gash (2008). Yang menjadi dasar dalam penanggulangan sampah di Desa Sumput diatur oleh peraturan yaitu Perbup Kabupaten Gresik No. 73 Tahun 2022 dan juga untuk pihak swasta ikut berkerjasama dengan program CSR. Selanjutnya, menurut (Molla et al., 2021) regulasi adalah kewenangan yang didapatkan dari instansi atau organisasi guna mengelola dan mengatur kegiatan yang berada didalam wilayah hukumnya.

Para aktor kolaborasi dan pekerja harus menjalankan sesuai dengan peraturan ataupun kesepakatan yang sudah dibuat dan dibutuhkan komitmen dari para aktor kolaborasi supaya kolaborasi bisa dijalankan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nagar dalam jurnal (Dewi & Surya, 2017), yang menyatakan tujuan organisasi akan tercapai jika pegawai memiliki komitmen terhadap organisasinya, karena pegawai yang berkomitmen akan bersedia berusaha

agar tujuan organisasi tercapai. Sebaliknya jika pegawai tidak memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dalam bekerja akan menyebabkan organisasi menjadi tidak efektif. Dalam hal ini sub fokus desain kelembagaan dalam penanggulangan banjir belum begitu optimal.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kebijakan pemimpin dalam collaborative governance diterapkan oleh BPBD Kabupaten Gresik dan pihak perangkat Desa Sumpat. Pengaruh seorang pemimpin dalam membentuk kebijakan sangat penting untuk keberlangsungan kolaborasi. Sesuai dengan teori Peterson (2003) dalam Irawan (2022) yang menyebutkan kebijakan dari pemimpin harus dipahami dan kuat di wilayahnya. Kebijakan ini sudah berlaku di Desa Sumpat yang sudah berjalan hingga sekarang.

Kepemimpinan fasilitatif merupakan unsur penting dalam collaborative governance. Dalam jumlah, Ansell & Gash (2008:544) menyatakan “leadership is crucial for setting and clear ground rules, building trust, facilitating dialogue, and exploring mutual gains”. Kepemimpinan digunakan untuk memberdayakan serta memobilisasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan proses kolaborasi. Sehingga, kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab akan membawa keberhasilan dalam proses kolaborasi.

Berdasarkan teori dan hasil temuan di lapangan dijelaskan bahwa Kepemimpinan yang dilakukan di Desa Sumpat belum optimal sepenuhnya. Para pelaku kolaborasi dalam penanggulangan sampah di Desa Sumpat telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Namun kepemimpinan fasilitatif dalam penanggulangan sampah di Desa Sumpat lebih dominan dilakukan oleh Pihak BPBD Kabupaten Gresik dengan kebijakan dan bantuan serta upaya dalam penanganan banjir secara keseluruhan. Sedangkan Peran swasta di Desa Sumpat berfokus pada pelaksanaan program CSR, sedangkan peran dari masyarakat atau perangkat desa menjadi support terdepan.

Dalam mendorong suatu proses kolaborasi, pemimpin harus sering ikut campur dengan cara yang lebih direktif untuk membuat agenda. Hal ini ditunjukkan dari adanya upaya yang aktif dan berkelanjutan dalam menggerakkan para aktor untuk mau ikut dalam berkolaborasi. Pada pelaksanaannya, BPBD selalu yang berperan aktif membantu mengadakan beberapa sosialisasi terkait penanganan ketika banjir terjadi, ikut dalam memberikan bantuan nyata berupa makanan atau pakaian dan dalam perbaikan tanggul jebol yang mengakibatkan banjir parah di Desa Sumpat. Dalam hal ini sub fokus Kepemimpinan Fasilitatif dalam penanggulangan sampah di Desa Sumpat masih belum sepenuhnya kolaboratif. Ditunjukkan dari adanya peran pemerintah dan masyarakat yang masih minim dalam penanggulangan sampah di Desa Sumpat.

Proses Kolaborasi

1. Dialog Tatap Muka

Dalam proses kolaborasi, menurut Ansell & Gash (2008) semua tata kelola kolaborasi dimulai dari dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan,

dimana ini menjadi inti dari proses membangun kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama serta komitmen terhadap proses. Susskind dan Cruikshank (1987:95) dalam (Bustomi et al., 2022) menggambarkan proses pembangunan konsensus sebagai memiliki fase pranegosiasi, fase negosiasi, dan fase implementasi.

Sebelum kolaborasi ini terjadi dalam penanganan banjir tidak pernah melakukan pertemuan dalam bentuk forum dialog tatap muka seperti rapat atau sosialisasi untuk membahas penanggulangan banjir, hanya melakukan kewajiban aja seperti memberi bantuan apabila terjadi banjir. Dialog tatap muka yang dilakukan ini bertujuan untuk berbagi informasi, tujuan bersama serta pemahaman satu sama lain dalam menangani penanggulangan banjir. Sejalan dengan pendapat dari (Bustomi et al., 2022) yang menyatakan Semua tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, 'komunikasi tebal' yang diizinkan melalui dialog langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Namun, dialog tatap muka lebih dari sekadar media negosiasi. Ini adalah inti dari proses kolaborasi. Pertemuan dengan beberapa pihak perlu dilakukan dikarenakan dengan adanya diskusi langsung dengan berbagai pihak bisa memperoleh solusi dalam penanganan banjir lebih baik, didukung oleh teori yang dikemukakan Meier dan O'Toole Jr (2002) dalam Irawan (2022) yang menjelaskan keberhasilan program ditekankan dengan proses kerjasama antar organisasi yang membutuhkan kolaborasi. Namun, belum adanya pertemuan rutin yang dilakukan antar pelaku kolaborasi. Dapat disimpulkan bahwa dalam fokus dialog tatap muka dalam penanggulangan banjir proses tata kelola kolaboratif tidak berjalan dengan baik, ditandai dengan tidak pernah diadakannya pertemuan dengan para aktor kolaborasi.

2. Membangun Kepercayaan

Proses membangun kepercayaan dalam penanggulangan banjir di Desa Sumpat dilakukan dengan komunikasi yang intens baik secara formal maupun informal antar pelaku kolaborasi. Komunikasi formal misalnya melalui koordinasi dalam kegiatan pelaksanaan terkait penanganan banjir. Sedangkan bentuk komunikasi informal dilakukan koordinasi melalui whatsapp. Komunikasi yang sering dilakukan ini memperkuat kepercayaan antar pelaku kolaborasi. Namun, diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi dalam bentuk sosialisasi terkait penanggulangan banjir dan mengedukasi masyarakat masih jarang dilakukan oleh para pelaku kolaborasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada para pelaku kolaborasi.

Selanjutnya, Adanya transparansi juga menjadi salah satu cara membangun kepercayaan antar para pelaku kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Desa Sumpat. Bentuk dari transparansi ini adalah laporan kinerja. Adanya transparansi ini membuat proses kolaborasi berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan pendapat Meier dan O'Toole Jr (2002) dalam Irawan (2022), yang mengatakan adanya pengungkapan informasi organisasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan memiliki peran yang besar, antara lain informasi tersebut

menjadi salah satu sarana penting bagi stakeholder untuk mengawasi jalannya kegiatan organisasi. Dalam hal ini fokus membangun kepercayaan antar pelaku kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Desa Sumput sudah berjalan baik, ditunjukkan dari adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan komunikasi formal maupun informal. Proses membangun kepercayaan sudah berjalan baik ditunjukkan dari adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan komunikasi formal maupun informal. Namun, proses membangun kepercayaan dengan masyarakat masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dari jarang ada sosialisasi dan juga edukasi yang rutin kepada masyarakat.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen yang lahir di dalam proses collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Desa Sumput diawali dari adanya kebutuhan dari masing-masing pelaku kolaborasi. Adanya kepentingan ini memunculkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Komitmen dalam proses kolaborasi yaitu untuk mengurangi dampak dari banjir yang terus terjadi setiap tahun di desa sumput ini, dan menjaga lingkungan seperti sungai dan jalanan agar terbebas dari sampah sehingga tidak menimbulkan banjir. Maka dari itu adanya kepentingan masing-masing pihak, para pelaku kolaborasi mempunyai komitmen yang kuat, dibuktikan dari adanya bantuan-bantuan dari BPBD Gresik berperan dalam memberikan bantuan kedaruratan, memperbaiki tanggul jebol, melakukan evakuasi warga, serta menyalurkan logistik bagi masyarakat terdampak. Perangkat desa dan masyarakat berinisiatif melakukan kerja bakti membersihkan saluran drainase, membuat tanggul darurat, serta menjaga kebersihan lingkungan agar aliran air tetap lancar. Sementara itu, PT Dayasa Aria Prima turut mendukung melalui program CSR dengan melakukan normalisasi Kali Tengah, pengerukan saluran air, serta menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak banjir. Komitmen bersama ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mengurangi dampak banjir yang sering melanda Desa Sumput.

4. Kesepahaman Bersama

Ansell & Gash (2008), mengemukakan bahwa para pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang sama dari diadakannya kolaborasi, seperti visi dan misi, tujuan yang jelas, dan penyelarasan inti masalah. Selanjutnya, (Bustomi et al., 2022) menyatakan pada titik tertentu dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Berdasarkan teori dan hasil temuan di lapangan, pada pelaksanaannya, para pelaku kolaborasi yaitu BPBD Kabupaten Gresik, Perangkat Desa dan Swasta telah memiliki kesepahaman yang sama. Mereka telah paham mengenai visi dan misi diadakannya kolaborasi serta mereka juga telah memahami perannya masing-masing dalam proses kolaborasi. Para pelaku kolaborasi juga memahami tujuan dari diadakannya kolaborasi yaitu untuk penanggulangan banjir di Desa Sumput agar lebih efektif. Selain itu, bentuk upaya membangun pemahaman bersama antar stakeholders dilakukan dengan koordinasi dan musyawarah. Namun, antara pelaku kolaborasi dengan masyarakat masih belum memiliki kesepahaman

yang sama mengenai pentingnya penanggulangan banjir di desa sumput ini di karenakan dampaknya bisa sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal ini menjadi hambatan utama dalam proses kolaborasi penanggulangan banjir di desa sumput, yaitu mengubah kesepahaman dan pola pikir masyarakat. Kurangnya kesepahaman masyarakat dikarenakan peran dari stakeholder yang masih minim dalam melakukan sosialisasi. Dapat di lihat bahwa fokus Kesepahaman Bersama para pelaku kolaborasi yaitu BPBD Kabupaten Gresik, Perangkat Desa dan Swasta telah memiliki kesepahaman bersama. Ditunjukkan dari pelaku kolaborasi yang memahami perannya serta menjalankan visi dan misi. Namun, kesepahaman bersama stakeholders dengan masyarakat masih belum terjalin. Ditunjukkan dari banyaknya masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan menunjukkan ketidakpedulian lingkungan.

5. Hasil Sementara

Dalam jurnalnya Ansell & Gash (2008), mengemukakan bahwa basil antara merupakan hasil yang nyata dari kolaborasi, ini sebagai proses penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kesuksesan proses kolaborasi. Berdasarkan teori dan Hasil sementara yang didapatkan dari temuan di lapangan terkait proses kolaborasi dengan stakeholders di Desa Sumput yaitu kolaborasi ini juga banyak masyarakat yang tertolong di karenakan dampak banjir sebelumnya sangat parah dan membuat ekonomi masyarakat Desa Sumput jadi terganggu. Dalam hal ini pihak swasta tentunya dari PT Dayasa Aria Prima dari program CSR mereka memberikan banyak manfaat terutama yang paling terlihat yakni normalisasi Kali Tengah. Namun kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuangan sampah yang sembarangan memperparah dampak terjadinya banjir.

Selanjutnya, dalam penanggulangan banjir di Desa Sumput sampai saat ini masih belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah ada perbaikan jalan, normalisasi sungai, serta upaya perangkat desa, BPBD, dan masyarakat, banjir tetap terjadi ketika hujan deras turun karena saluran drainase belum mampu menampung debit air dengan baik. Selain itu, pembangunan perumahan yang masif di sekitar desa memperparah kondisi aliran air, sehingga genangan kerap masuk ke jalan maupun permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan agar benar-benar efektif dalam mengatasi banjir secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian tentang collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Desa Sumput dengan menggunakan empat indikator dari Ansell & Gash (2008) dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal terbentuknya kolaborasi memunculkan adanya insentif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga menyebabkan para aktor stakeholders memiliki komitmen yang kuat dalam proses kolaborasi. Ditunjukkan dari kondisi awal dari awal sebelum terjadinya kolaborasi

dikarenakan adanya kebutuhan dari masing masing pelaku organisasi hingga memasuki proses kolaborasi di Desa Sumput.

2. Desain Kelembagaan

Desain Kelembagaan dalam penanggulangan banjir di desa sumput bisa di simpulkan belum begitu optimal. Di tunjukan dengan para pihak kolaborasi belum ada kesepakatan yang mangatur arah kolaborasi, namun antar pihak sudah berkomitmen untuk penanggulangan banjir di desa sumput.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan Fasilitatif dalam penanggulangan banjir di desa sumput masih belum sepenuhnya kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif lebih dominan dilakukan oleh Pihak BPBD Kabupaten Gresik dengan kebijakan dan bantuan serta upaya dalam penanganan banjir secara keseluruhan. Sedangkan Peran swasta di Desa Sumput berfokus pada pelaksanaan program CSR, sedangkan peran dari masyarakat atau perangkat desa menjadi support terdepan.

4. Proses Kolaborasi

a. Dialog Tatap Muka

Pada Dialog Tatap Muka dalam penanggulangan banjir di desa sumput proses tata kelola kolaboratif tidak berjalan dengan baik, ditandai dengan jarang diadakannya pertemuan langsung dengan para aktor kolaborasi. Sehingga kebijakan biasanya di ambil melalui hasil laporan saja.

b. Membangun Kepercayaan

Proses Membangun Kepercayaan para aktor kolaborasi dapat di katakan sudah berjalan baik ditunjukkkan dari adanya upaya yang dilakukan yaitu dengan komunikasi formal maupun informal. Namun, proses membangun kepercayaan dengan masyarakat masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dari jarang adanya sosialisasi dan juga edukasi yang rutin kepada masyarakat.

c. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen Terhadap Proses para pelaku kolaborasi dalam penanggulangan banjir di desa sumput bisa dikatakan kuat dapat dilihat dari adanya memberikan bantuan kedaruratan, memperbaiki tanggul jebol, melakukan kerjabakti antar masyarakat, serta menyalurkan logistik bagi masyarakat terdampak di mana ini merupakan bentuk keseriusan para pelaku kolaborasi.

d. Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama para pelaku kolaborasi telah memiliki kesepahaman bersama. Namun, kesepahaman bersama stakeholders dengan masyarakat masih belum terjalin. Ditunjukkan dari banyaknya masyarakat yang masih tidak peduli lingkungan dengan suka membuang sampah sembarangan sehingga irigasi jadi terhambat yang memperparah banjir.

e. Hasil Sementara

Hasil Sementara dari proses kolaborasi dalam penanggulangan banjir di desa sumput masih belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah ada perbaikan jalan, normalisasi sungai, serta upaya perangkat desa, BPBD, dan

masyarakat, banjir tetap terjadi ketika hujan deras turun karena saluran drainase belum mampu menampung debit air dengan baik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Sumpat. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran stakeholders dalam pengelolaan sampah harus lebih ditingkatkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Para aktor kolaborasi harus sering melakukan dialog secara langsung agar lebih bisa dicari solusi yang terbaik kedepannya.
2. Para masyarakat sebaiknya di beri arahan lagi melalui sosialisasi atau kegiatan bersama terkait menjaga lingkungan seperti tidak buang sampah sembarangan agar lebih tereduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti AF, H. S. (2020). Analisis penanggulangan banjir sungai kanci. *Jurnal Konstruksi Dan Infrastruktur: Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 7(3). <https://doi.org/https://www.ejournalugi.com/index.php/Konstruksi/article/download/3893/1932>
- Baskoro, A. G., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang Penanganan Banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 112-124. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1745>
- Bustomi, A., Rahman, F., & Hidayat, R. (2022). Proses pembangunan konsensus dalam tata kelola kolaboratif. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145-158.
- Chris Ansell, A. G. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dewi, N. L. P. A., & Surya, I. B. K. (2017). Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Manajemen*, 6(2), 123-135.
- Frege, I. A., Blicke, V., Bradshaw, S., Dijkzeul, D., Funke, C., Kienzl, P., Kusters, K., Masuch, L., Nasreen, M., Radtke, K., Schneider, S., Thielborger, P., Weller, D., Wieggers, O., Yaman, D. K., & Zennig, K. (2023). *World Risk Report 2023*. Ruhr University Bochum: Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV). <https://doi.org/https://repository.gheli.harvard.edu/repository/10930/>
- Haqqi, H. (2019). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kendal. *Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*
- Irawan, H. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349-1358.

- Mutiarawati, T., & Sudarmo, S. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Wacana Publik*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Molla, A., Hassan, R., & Islam, M. S. (2021). Regulatory governance and institutional authority in public administration. *Journal of Public Policy and Governance*, 14(2), 45–60
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. . R. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik (T. D. Press (ed.)). Universitas Diponegoro Press.
- Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. RAJAWALI PERS.
- Triaryanti, I. M. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. UNIVERSITAS AIRLANGGA. <https://doi.org/https://repository.unair.ac.id/94727/>